



Tolak Pindahkan Ibukota Karena Banjir

Menteri ATR Soroti Tata Ruang DKI

JAKARTA- Wacana pemindahan ibukota negara kembali mencuat seiring dengan bencana banjir yang menghantui DKI Jakarta setiap tahunnya. Dengan ibukota negara yang baru, diyakini tata ruang dan lingkungan yang menjadi persoalan banjir saat ini dapat dibenahi sedini mungkin.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan menolak pemindahan ibukota tersebut dalam kondisi seperti saat ini. Menurut dia, jika ibukota negara dipindahkan dari DKI Jakarta karena banjir, hal tersebut berarti pemerintah lari dari kenyataan.

"Pemindahan ibukota karena banjir, itu kita lari dari kenyataan. Atasi dulu permasalahan (banjir), baru kita bicara itu. Kita harus berani hadapi kenyataan. Ini (DKI Jakarta) harus kita desain 2-3 tahun untuk hindari banjir," kata Ferry saat melakukan kunjungan kerja (kunker) di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jati Baru, Jakarta Pusat, Rabu (11/2).

Dia mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta harus memiliki langkah-langkah mendasar untuk mengatasi bencana banjir. Yakni dengan mengajak pemilik gedung-gedung di Jakarta untuk bertanggung jawab terhadap saluran dan drainase.

"Sekarang terbebani oleh Pemda (Jakarta) semuanya. Orang bangun mal tapi tak ada tanggung jawabnya. Kita harus punya sistem pembuangan dulu. Ketika orang membangun gedung, kemudian mereka harus bangun dan mengkoneksikan dengan saluran airnya," tukas dia.

Walaupun Pemda DKI Jakarta telah memiliki peraturan terkait rencana tata ruang dan pembangunan gedung dan drainasenya, namun Ferry menyebutkan hal itu harus disempurnakan dengan sanksi yang tegas. Hal ini agar para pemilik gedung dapat bertanggung jawab penuh terhadap saluran drainase mereka.

"Peraturan pembangunan saluran air di gedung-gedung mungkin sekarang sudah ada. Tapi walaupun sudah ada nanti akan kita lihat lagi untuk disempurnakan. Yang penting itu ada sanksinya. Termasuk Amdal (Analisis Dampak Lingkungan), itu bagus sebagai sebuah kajian untuk memelihara lingkungan hidup," tegas Ferry.

Untuk itu, kata Ferry, pihaknya akan bertemu dengan Gubernur DKI untuk membahas jalan keluar persoalan banjir tersebut.

"Kita harus mengatakan bahwa sebagai ibukota negara, dia harus punya desain yang mampu menyalurkan air. Jadi, kalau hujan banjir itu problem. Kalau ada bencana, terus kemudian banjir, siapapun takan bisa menolak bencana. Ini kan sesuatu yang rutin, seharusnya bisa kita selesaikan. Jadi, prinsipnya adalah ketika RTH yang berkaitan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan sistem resapan air. Itu yang harus dibangun," bebarnya.

Ferry mengatakan, Gubernur DKI juga pastinya tidak ingin setiap hujan, Jakarta selalu kebanjiran. "Ketika hujan dan terjadi banjir, selalu berdebat apa yang harus dilakukan. Tetapi, ketika musim kering, sudah lupa lagi. Kita hrs melihat dimana titik yang menyumbat, kenapa air tak mengalir. Dari sana kemudian dipikirkan apa yang akan dilakukan pada musim kemarau," pungkas Ferry. (jpm)